

Pendidikan Politik Bagi Warga Untuk Memiliki Kesadaran dan Sikap Aktif di Pemilu 2024

Fajar Muharram¹, Mahardika Darmawan. K.W², Mochamad Rizal Yulianto³

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Guru SD, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

³ Program Studi Bisnis Digital Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email: fajarmuharram@umsida.ac.id, Mahardikadarmawan@umsida.ac.id,
rizaldo@umsida.ac.id

DOI: -

Received: 16-12-2023

Accepted: 21-12-2023

Published: 01-01-2024

Abstract:

Political education has a major role in public awareness in having an active attitude towards the participatory democratic process, one of which is elections. Political education is carried out by looking at the typological portrait of Sidoarjo society based on the demography of the region divided into two, namely the type of traditional society and the type of semi-metropolis society. Political education was conducted in five sub-districts of Sidoarjo Regency, namely Jabon, Tanggulangin, Prambon, Tarik and Wonoayu. The implementation of political education to the people of Sidoarjo is done to shape the political personality of Sidoarjo citizens, especially the younger generation, so that it will not lead to apathy or blindness to political issues. In addition, the use of social media is a promising arena and land for conducting political education and political marketing, because it will be directly in contact with two voters who have a large percentage of gadget use.

Keywords: Political Education, Society, Political Awareness .

Abstrak:

Pendidikan politik memiliki peranan yang besar terhadap kesadaran masyarakat dalam memiliki sikap aktif terhadap proses demokrasi partisipatif, salah satunya pemilu. Pendidikan politik dilakukan dengan melihat potret tipologi masyarakat sidoarjo berdasarkan demografi wilayah terbagi menjadi dua, yaitu tipe masyarakat tradisional dan tipe masyarakat semi metropolis. Pendidikan politik dilakukan di lima titik kecamatan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Jabon, Tanggulangin, Prambon, Tarik, dan Wonoayu. Pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat Sidoarjo dilakukan untuk membentuk kepribadian politik warga masyarakat sidoarjo, khususnya generasi muda, sehingga tidak akan sampai mengarah kepada tindakan yang apatis atau buta terhadap persoalan politik. Selain itu, penggunaan media sosial menjadi arena dan lahan yang menjanjikan untuk melakukan pendidikan politik maupun pemasaran politik, karena akan langsung bersentuhan dengan dua pemilih yang memiliki prosentase yang besar dalam penggunaan gadget.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Masyarakat, Kesadaran Politik

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan aspek krusial dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran dan sikap aktif dalam proses demokrasi (Wahyuningsih, 2013), terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang politik menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa warga negara dapat mengambil peran yang efektif dalam menentukan arah masa depan bangsa. Dengan berbagai dinamika politik yang terus berkembang, penting bagi setiap individu untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam menyaring informasi, memahami platform politik, dan menganalisis berbagai isu publik. Pendidikan politik bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan sikap kritis yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab di dalam lingkup demokrasi (Rolos, 2015).

Dalam menghadapi Pemilu 2024, penting bagi setiap warga negara untuk memahami betapa krusialnya peran politik mereka. Pendidikan politik membantu masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa warga negara tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga aktor yang sadar dan aktif dalam membentuk tatanan politik yang lebih baik (Hartati, 2020).

Kesadaran politik juga menjadi poin kunci dalam proses pendidikan politik. Dengan meningkatkan pemahaman tentang politik, warga negara dapat lebih baik memahami berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi fokus dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang solid, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mampu mempertimbangkan dengan bijak setiap tindakan politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan bersama (Hermawan, 2020).

Selain itu, pendidikan politik juga berperan dalam membentuk sikap partisipatif dan keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab politik, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik, seperti memberikan kontribusi melalui pemilihan umum, memberikan masukan, atau bahkan terlibat langsung dalam kegiatan politik lokal. Kesadaran dan sikap aktif ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan demokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola negara (Nurjanah, 2011).

Secara keseluruhan, pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam proses politik. Dalam menghadapi Pemilu 2024, pendidikan politik menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, isu-isu penting, serta perannya sebagai agen perubahan dalam membangun negara yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan (action research) yang melibatkan dua tahap utama: perencanaan dan implementasi. Penelitian tindakan memungkinkan intervensi yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan dan respons masyarakat dalam proses pendidikan politik. Lokasi penelitian melibatkan masyarakat Sidoarjo yang representatif dari berbagai lapisan masyarakat. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan keragaman sosial, ekonomi, dan geografis untuk memastikan hasil penelitian dapat diaplikasikan secara lebih luas.

Subjek penelitian adalah warga masyarakat di wilayah Sidoarjo dari berbagai kelompok usia, latar belakang pendidikan, dan status sosial. Partisipasi aktif dari berbagai segmen masyarakat akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas pendidikan politik. Instrumen penelitian mencakup kuesioner pra-pendahuluan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal dan kebutuhan pendidikan politik, serta instrumen evaluasi untuk mengukur dampak setelah penerapan pendidikan politik. Fokus kelompok dan wawancara mendalam juga digunakan untuk mendapatkan pandangan mendalam dari peserta.

Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan melalui serangkaian kegiatan, seperti seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan media pembelajaran interaktif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi interaksi langsung antara fasilitator dan peserta, memungkinkan pertukaran ide dan pemahaman. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, kuesioner, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur perubahan dalam pemahaman, kesadaran, dan sikap politik peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendidikan politik mempunyai tujuan pokok antara lain yaitu partisipasi politik rakyat, keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan dalam menentukan kebijakan publik. Dengan kata lain bahwa pendidikan politik telah mempengaruhi individu dalam perjuangan politik guna mencapai penyelesaian konflik yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda terdapat 3 mekanisme: Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. dalam istilah lain sering disebut kognitif morality. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha

dan pematangan. Sedangkan tahap terakhir berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan

setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik. Untuk menumbuhkan partisipasi dari setiap masyarakat maupun generasi muda, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak dilakukan. Dalam hal ini, kami sebagai akademisi memiliki kewajiban dalam melakukan proses-proses Pendidikan politik bagi warga masyarakat dan anak muda di lima kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.



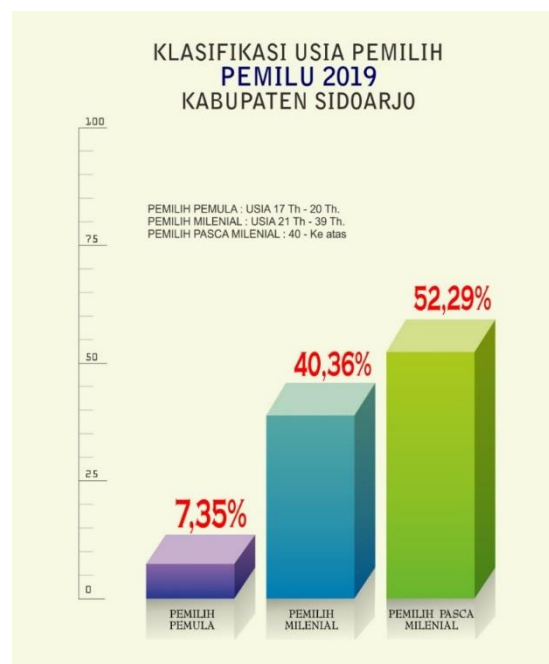
Gambar 1. Pendidikan Politik di Kecamatan Tanggulangin dan Jabon

Warga masyarakat Sidoarjo sesungguhnya menjadi salah satu unsur penting dalam pemilu 2024, karena merupakan akar (*grassroot*) dari demokrasi. Selain itu, nilai-nilai universal yang tertanam dalam diri masyarakat tentang keberagaman, mampu mengikis bahkan menegasikan kecenderungan partikularisme. Sehingga akan memunculkan rasa menghargai pada diri individu terhadap keberagaman untuk saling menghormati pada setiap keputusan yang diambil. Langkah tersebut dilakukan untuk menjadikan sebuah kesadaran kolektif yang nantinya akan menjaga kebhinekaan dalam proses bernegara. Ada tiga peran dalam pemilu yang dapat dijalankan warga masyarakat Sidoarjo pada saat kami melakukan Pendidikan politik kepada mereka, pertama, sebagai pelayan publik, artinya masyarakat Sidoarjo wajib membantu pemerintah untuk menyelenggarakan proses-proses politik yang demokratis. Kedua, sebagai substitusi, artinya masyarakat Sidoarjo bisa saja mengambil tindakan-tindakan yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah, misalnya adalah dengan membangun komunitas atau organisasi sebagai wadah edukasi tentang pemilu. Terakhir, sebagai kontrol social (*social control*), yaitu dengan melakukan langkah-langkah konkrit di bawah seperti advokasi, pendampingan, dan bahkan praktik-praktik oposisi untuk menyeimbangkan kekuatan hegemonik negara.



Gambar 2. Pendidikan Politik kepada Masyarakat Kecamatan Prambon, Tarik dan Wonoayu

Makna sesungguhnya dari pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat Sidoarjo adalah pertama, untuk membentuk kepribadian politik warga masyarakat Sidoarjo, khususnya generasi muda, sehingga tidak akan sampai mengarah kepada tindakan yang apatis atau buta terhadap persoalan politik. kedua kesadaran politik, dimana merupakan sebuah pengetahuan individu masyarakat Sidoarjo dalam mengetahui dan memahami permasalahan politik sehingga mampu memposisikan diri dari kondisi tersebut dalam sebuah partisipasi positif. Dan yang terakhir adalah partisipasi politik yang memiliki hubungan dengan kecerdasan publik, terhadap kualitas demokrasi dan produk-produk demokrasi seperti peraturan perundang-undangan yang baik bagi kualitas pelayanan publik. Disamping itu, distribusi informasi juga harus dilakukan dengan baik karena terdapat klasifikasi pemilih berdasarkan usia di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Klasifikasi Usia Pemilih Kabupaten Sidoarjo

Pendidikan Politik juga perlu mempertimbangkan klasifikasi pemilih berdasarkan usia. Karena disadari atau tidak, di era millennial ini banyak caleg maupun partai yang dengan agresif mulai menyisir kalangan tersebut untuk mendapatkan dukungan dan suara. Dengan kata lain, mereka tidak lagi terbebani dengan besaran prosentase masyarakat lokal, tetapi lebih kepada klasifikasi pemilih berdasarkan usia. Maka dari itu, langkah yang dilakukan adalah melakukan pemetaan. Pemetaan yang dimaksud adalah di ruang mana pemilih pemula dan pemilih millennial banyak melakukan interaksi sosial maupun pertukaran informasi, dan program-program atau branding apa saja yang diinginkan.

Penulis memahami bahwa sesungguhnya kualitas demokrasi dikatakan baik jika sejalan dengan tingkat partisipasi warga masyarakat, dengan kata lain bahwa ada keterlibatan aktif dalam proses-proses politik yang terjadi di daerah. Respon warga masyarakat Sidoarjo, khususnya generasi muda, sangat antusias karena mereka merasa mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Mereka bahkan meyakini bahwa ungkapan Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman yang hidup di abad ke-19 (1898-1956) tentang buta politik memang benar adanya jika masyarakat terus pasif dalam kontestasi politik negeri ini. Penyair Jerman Bertolt Brecht mengatakan bahwa, "Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri."

KESIMPULAN

Penulis memahami bahwa harus terdapat elemen pemerintah dan partai politik yang harus turun untuk melakukan proses Pendidikan politik di tingkat bawah. Karena berdasarkan informasi yang di dapat dari lapangan, tidak pernah ada Pendidikan poltiik dilakukan oleh dua institusi tersebut. Selain itu, erlu ada keseimbangan informasi yang modern yang dimana dalam proses Pendidikan politik, peran teknologi harus digunakan sebagai wadah yang baik tetapi harus sesuai kebutuhan masyarakat generasi muda saat ini, sehingga informasi mampu tersampaikan ke seluruh kalangan generasi muda serta masyarakat umum.

Dalam pelaksanaan Pendidikan politik, harus juga dilakukan pemetaan antara klasifikasi usia pemilih di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga distribusi informasi bisa terserap dengan baik. Jika kita melihat kondisi hari ini, maka media sosial menjadi arena dan lahan yang menjanjikan untuk melakukan pendidikan politik maupun pemasaran politik, karena akan langsung bersentuhan dengan dua pemilih yang memiliki prosentase yang besar dan pemikiran yang terbuka serta rasional. Karena disadari atau tidak, media sosial menjadi ruang untuk mengelola dan mendistribusikan informasi, sehingga ikut

mempengaruhi aspek *contain* maupun pilihan dari pemilih pemula dan pemilih millennial di kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Habermas, J. (2010). *Ruang Publik, Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat* Borjuis (terj.). Bantul: Kreasi Wacana
- Hartati, S. (2020). Penerapan Model New Public Management (Npm) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(2), 65–84. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i2.1293>
- Hermawan, I. C. (2020). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA* (Vol. 10). Vol. 10. Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/download/939/838>
- Nurjanah, N. (2011). *PENGARUH BUDAYA PATRIARKHI, PENDIDIKAN POLITIK DAN PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN INDRAMAYU*. Retrieved from <http://repository.upi.edu/9606/>
- Rolos, M. F. (2015). *FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT (STUDI DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO)* (Vol. 1). Vol. 1. Retrieved from <https://lens.org/175-394-530-959-130>
- Raga Maran, R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sartori, G. (1987). *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham: Chatham House Publishers
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
- Wahyuningsih, E. (2013). *KONSTRUKSI PENDIDIKAN POLITIK PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA PANGKALPINANG : Studi Kasus dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan SMA Depati Amir Pangkalpinang*. Retrieved from <http://repository.upi.edu/8133/>